

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Akuntansi



Oleh :

Nama : YUNI RAHMA PARINDURI

NPM : 1305170369

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

ABSTRAK

YUNI RAHMA PARINDURI. NPM. 1305170369. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, 2017, Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab menurunnya kemandirian dan efektivitas pada Kota Tebing Tinggi, untuk mengetahui dan menganalisis penyebab meningkatnya efisiensi pada Kota Tebing Tinggi dan untuk mengetahui dan menganalisis keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang diukur dengan menggunakan keuangan daerah.

Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif, dengan menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data yang berasal dari data primer dan sekunder yang mana pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan wawancara..

Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan Daerah Kota Tebing Tinggi dengan menggunakan pengukuran keuangan daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi, dan meningkatnya belanja daerah Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi, selain itu juga pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi tidak mampu meningkatkan dan mengelola hasil pendapatan asli daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi masih harus bergantung dengan dana pemerintah pusat.

Kata Kunci : *Pengelolaan Keuangan, Kemandirian, Efektivitas dan Efisiensi*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, dimana skripsi ini sangat penulis butuhkan dalam rangka sebagai kelengkapan penulis untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan para pembaca berkenan memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, pertama kali penulis ucapkan terima kasih untuk seluruh keluarga telah memberikan bantuan dan dukungan baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun tidak begitu sempurna.

Selanjutnya, tak lupa penulis juga dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda telah banyak berkorban dan membesarkan, mendidik serta memberikan dukungan baik moral dan material, sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak H. Januri, S.E, M.M, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Hj. Dahrani, SE, M.Si, Selaku dosen pembimbing saya dalam penyelesaian skripsi.
7. Bapak Pimpinan Pemerintah Kota Tebing Tinggi beserta seluruh pegawai yang telah memberikan kesempatan riset kepada penulis, dan juga banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
8. Kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis, semoga kita bisa sukses selalu.

Seiring doa dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis serta dengan menyerahkan diri kepada Nya, seraya mengharapkan ridho Nya dan dengan segala kerendahan hati penulis menyerahkan Tugas Akhir ini yang jauh dari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, Akhirnya, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, Aamiin... ya Rabbal Alaamiin...

Medan, Oktober 2017
Penulis

YUNI RAHMA PARINDURI
1305170369

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teoritis.....	9
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	9
2. Analisis Kinerja Keuangan Daerah	18
3. Pengukuran Keuangan Daerah	19
4. Penelitian Terdahulu.....	27
B. Kerangka Berpikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Definisi Operasional.....	32
C. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	34

E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
1. Deskripsi Data	37
2. Analisis Data	37
B. Pembahasan	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Kemandirian Pemerintah Kota Tebing Tinggi	3
Tabel I.2 Efektivitas Pemerintah Kota Tebing Tinggi	4
Tabel I.3 Efisien Pemerintah Kota Tebing Tinggi	5
Tabel II.1 Pola Hubungan Kemandirian Daerah21
Tabel II.2 Kriteria Pengukuran Efektivitas22
Tabel II.3 Kriteria Pengukuran Efisien23
Tabel II.4 Penelitian Terdahulu	27
Tabel III.1 Waktu Penelitian	34
Tabel IV.1 Kemandirian	38
Tabel IV.2 Rasio Efektivitas	41
Tabel IV.3 Rasio Efisien	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir	31
Gambar IV.1 Kemandirian	39
Gambar IV.2 Efektivitas	41
Gambar IV.3 Efisiensi.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan yang diberikan kewenangan secara luas untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan. Dalam UU No. 32 tahun 2004 pemerintah daerah (PEMDA) kabupaten diberi kewenangan yang luas dengan menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, hingga evaluasi. Menurut Pasal 4 peraturan pemerintah (PP) No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2009 : 182).

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai keuangan, diantaranya Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensi, Kesenjangan, dan Pertumbuhan dan DSCR. (Halim, 2008: 230).

Menurut Halim (2008:221) menyatakan bahwa Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dan untuk Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal.

Efektivitas menggambarkan kemampuan yang dicapai Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dan untuk efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefesiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mardiasmo (2009:113).

Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Mahmudi (2010:138)

Pengukuran kinerja pemerintah Kota Tebing Tinggi yang diukur dengan menggunakan data keuangan daerah maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Kemandirian Pemerintah
Kota Tebing Tinggi

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	RKKD	Standar Kemandirian
2012	Rp. 47.330.983.758	Rp. 482.097.882.096	9,8%	0% - 25%
2013	Rp. 53.199.538.064	Rp. 596.249.862.831	8,9%	0% - 25%
2014	Rp. 74.515.273.851	Rp. 628.621.517.914	11,9%	0% - 25%
2015	Rp. 82.410.053.810	Rp. 667.061.086.952	12,4%	0% - 25%
2016	Rp. 94.058.491.717	Rp. 707.957.368.508	13,3%	0% - 25%

Sumber : Data diolah (2017)

Dilihat dari tabel 1.1 untuk kemandirian untuk tahun 2013 dan tahun 2016 kemandirian mengalami peningkatan, tetapi untuk kemandirian tahun 2012 sampai tahun 2016 berada dibawah standar kependagri No.690.900.327 yaitu dibawah 25%, yang artinya kemandirian masih tergolong rendah sekali, karena masih berada diantara 0 sampai 25%, selain itu kemandirian pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga termasuk pola hubungan yang instruktif dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah. Semakin tinggi Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah. Halim (2008:221)

Tabel 1.2
Efektivitas Pemerintah
Kota Tebing Tinggi

Tahun	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	Efektivitas	Standar Efektivitas
2012	Rp. 482.097.882.096	Rp. 467.794.127.694	103,4%	(x > 100%)
2013	Rp. 596.249.862.831	Rp. 598.722.930.567	99,6%	(x > 100%)
2014	Rp. 628.621.517.914	Rp. 625.779.796.283	100,5%	(x > 100%)
2015	Rp. 667.061.086.952	Rp. 685.603.027.096	97,3%	(x > 100%)
2016	Rp. 707.957.368.508	Rp. 736.984.324.320	96%	(x > 100%)

Sumber : Data diolah (2017)

Dapat dilihat dari tabel 1.2 untuk efektivitas untuk tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan, untuk efektivitas tahun 2013, tahun 2015 sampai tahun 2016 berada dibawah standar kependagri No.690.900.327 yaitu dibawah 100%, yang artinya efektivitas dalam kategori tidak efektif karena berada jauh dibawah dari standar efektivitas. Semakin tinggi efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif. (Mardiasmo, 2009 : 110)

Tabel 1.3
Efisien Pemerintah
Kota Tebing Tinggi

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Efisien	Standar Efisien
2012	Rp. 479.585.196.047	Rp. 482.097.882.096	99,5%	< 60%
2013	Rp. 584.572.435.995	Rp. 596.249.862.831	98%	< 60%
2014	Rp. 614.015.440.542	Rp. 628.621.517.914	97,7%	< 60%
2015	Rp. 666.009.096.237	Rp. 667.061.086.952	99,8%	< 60%
2016	Rp. 759.862.992.873	Rp. 707.957.368.508	107,3%	< 60%

Sumber : Data diolah (2017)

Dapat dilihat dari tabel 1.3 untuk efisiensi ditahun 2015 dan tahun 2016 mengalami peningkatan, dan ditahun 2012 sampai tahun 2016 efisien berada diatas 60% yang sesuai dengan standar kepmendagri No.690.900.327 yang artinya efisien dalam kategori tidak efisien, hal ini terjadi dikarenakan belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mengalami peningkatan, bahkan melebihi dari jumlah pendapatan. Semakin kecil efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. (Mardiasmo, 2009 : 112).

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Fitri Umi Hanik (2014) dimana Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian masih sangat rendah tetapi terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. efektivitas cenderung efektif, sedangkan efisiensi sudah efisien. Pada aktivitas DPPKAD Kabupaten Semarang masih diprioritaskan untuk belanja rutin (Operasi) daripada untuk belanja pembangunan (Modal). Pertumbuhan menunjukkan trend positif kecuali pada pos belanja modal ada yang negatif. *Debt service coverage ratio* sudah lebih dari standar kemampuan 2,5%. Dengan demikian, kinerja keuangan pada DPPKAD Kabupaten Semarang berdasarkan analisis keuangan daerah cukup baik.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kemandirian Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 berada dibawah standar kepmendagri No.690.900.327.
2. Efektivitas Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan dan berada dibawah standar kepmendagri No.690.900.327.
3. Efisiensi Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami peningkatan dan berada diatas standar kepmendagri No.690.900.327.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas tentang tiga dalam mengukur kinerja keuangan daerah yaitu kemandirian, efektivitas dan efisiensi. Hal ini disebabkan karena hanya tiga pengukuran kinerja keuangan daerah yang

memiliki indikator dalam penilaian atas setiap pencapaian yang diperolehnya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah penyebab menurunnya kemandirian dan efektivitas pada Kota Tebing Tinggi?
- b. Apakah penyebab meningkatnya efisiensi pada Kota Tebing Tinggi?
- c. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang diukur dengan menggunakan keuangan daerah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab menurunnya kemandirian dan efektivitas pada Kota Tebing Tinggi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab meningkatnya efisiensi pada Kota Tebing Tinggi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang diukur dengan menggunakan keuangan daerah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan serta manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Memberi sarana penulis untuk melatih kemampuan teknis dalam membandingkan ilmu pengetahuan teori dengan pelaksanaan yang sebenarnya dan juga Menambah wawasan serta memahami keuangan pemerintah daerah.

b. Secara Praktis

Untuk dijadikan masukan atau informasi bagi pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi dalam pengelolaan APBD di masa depan.

c. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian terhadap topik-topik tertentu yang berkaitan dengan penilaian kinerja PEMDA dalam mengelola keuangan dengan cara menganalisis APBD dan juga memberikan sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Mahsun (2011:81) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/ belanja daerah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Abdul Halim (2008:87) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- 4) Periode anggaran, biasanya satu tahun.

b. Proses Penyusunan APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, proses penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

- 2) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD.
- 3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 4) Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

- 5) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dan perkiraan belanja.
- 6) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
- 7) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
- 8) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD.
- 9) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
- 10) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.
- 11) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

c. Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD antara lain:

1) Prinsip Penyusunan APBD

Penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya.
- b) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
- d) Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
- e) Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- f) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

2) Kebijakan Penyusunan APBD

Kebijakan penyusunan APBD terkait dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.
- c) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah.

2) Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH).
- b) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU).
- c) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- b) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).
- c) Penganggaran Dana Otonomi Khusus.
- d) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID).
- e) Pendapatan yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- f) Penganggaran Dana Transfer lainnya.

- g) Penganggaran pendapatan kabupaten/ kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi.
- h) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
- i) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/ luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
- j) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
- k) Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-

lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, Objek dan rincian Objek pendapatan Dana Darurat.

b) Belanja Daerah

Pemerintah Daerah menetapkan target pencapaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

1) Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai.

Belanja Pegawai merupakan belanja untuk honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

b) Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja untuk pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/ pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, mencakup belanja barang habis pakai, bahan/ material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari

tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

c) Belanja Modal.

Belanja Modal merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2) Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai.

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b) Belanja Bunga.

Belanja Bunga merupakan belanja untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c) Belanja Subsidi.

Belanja Subsidi merupakan belanja untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

d) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Hibah merupakan belanja untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e) Belanja Bagi Hasil Pajak.

Belanja Bagi Hasil Pajak merupakan belanja untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

f) Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Bantuan Keuangan merupakan belanja untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/ kota, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan.

g) Belanja Tidak Terduga.

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

c) Surplus/ Defisit APBD.

1) Penerimaan Pembiayaan, semua penerimaan yang ditujukan untuk menutup defisit APBD:

a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA);

b) Pencairan dana cadangan;

c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d) Penerimaan pinjaman daerah;

e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan

f) Penerimaan piutang daerah.

2) Pengeluaran Pembiayaan, semua pengeluaran yang ditujukan untuk memanfaatkan surplus APBD:

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penerimaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;

c. Pembayaran pokok utang; dan

d. Pemberian pinjaman daerah.

2. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Bastian (2010:112), “Kinerja anggaran adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi”. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran

atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil, manfaat, dan dampak.

Menurut Mulyadi (2007), kinerja yang merupakan keberhasilan personil, tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu tersebut dan mempunyai kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Kriteria tersebut berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa adanya tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Salah satu cara yang dilakukan dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangannya adalah menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah (Abdul Halim, 2008).

3. Pengukuran Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penggunaannya. Menurut Mahsun (2011:135) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam

APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim 2008:4).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Menurut Abdul Halim (2008: 4) adapun pihak-pihak yang memiliki berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini yaitu: pihak DPRD, pihak eksekutif, pihak pemerintah pusat ataupun provinsi, serta masyarakat dan kreditor.

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*)

a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2008) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat

ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel II.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipasif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327

- a. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
- c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

d. Pola Hubungan Delekatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

b) Rasio Efektivitas

Menurut Abdul Halim (2008) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel II.2
Kriteria Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327

c) Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah semakin baik.

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengfesiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2009 : 112) yang menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel II.3
Kriteria Pengukuran Efisien

Persentase	Kriteria
(≤ 60%)	Sangat efisien
(60% - 80%)	Efisien
(80% - 90%)	Cukup efisien
(90% - 100%)	Kurang efisien
(> 100%)	Tidak efisien

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327

d) Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Menurut Abdul Halim (2008 : 236) semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

1. Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah.

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi.

Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.

Menurut Mahmudi (2010 : 164) didalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.

Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Menurut Mahmudi (2010 : 164) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5 sampai 20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

e) Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah.

Rasio pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan dimasa yang lalu. Menurut Mahmudi (2010:138) Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan PAD Tahun } t = \frac{\text{PAD Tahun } t - \text{PAD Tahun } t-1}{\text{PAD Tahun } t-1} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut Abdul Halim (2008:241) untuk rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah, PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya.

f) DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*)

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. DSCR dapat dihitung dengan rumus (Abdul Halim, 2008:238):

$$\text{DSCR } i = \frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}}$$

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.4
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Penelitian	Hasil Penelitian
1.	George Kawung (2014)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012	Variabel : Kinerja Keuangan Daerah	Berdasarkan hasil penelitian, dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah.
2.	Heri Triyono (2013)	Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo APBD 2009-2011	Penelitian menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo APBD 2009-2011 yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian rendah dengan tingkat ketergantungan dari pihak eksternal masih tinggi. Rasio efektivitas yang dicapai tinggi. Rasio efisiensi menunjukkan dalam memungut PAD sudah efisien. Rasio aktivitas pada belanja pembangunan masih rendah. Rasio pertumbuhan menunjukkan hasil yang positif. Rasio derajat desentralisasi rendah.
3.	Wakhyudi (2013)	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio	Penelitian ini menganalisis Kinerja Pemerintah Daerah	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kemampuan pemerintah Kabupaten Bogor didalam mengelola keuangan

		Keuangan Daerah	Melalui Rasio Keuangan Daerah	daerahnya sendiri masih rendah. Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dihadapkan pada beberapa hambatan yaitu: Penetapan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD hingga Perda Laporan Realisasi APBD setiap tahunnya belum tepat waktu dan penganggarannya belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
4.	Listiyani Natalia (2015)	Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman	Penelitian ini menganalisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan di Pemerintah Kabupaten Sleman baik, dalam merealisasikan belanja daerahnya sudah efisien karena tidak melebihi anggaran. Namun ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi.
5.	Anim Rahmayati (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013	Penelitian ini menganalisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal

B. Kerangka Berpikir

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 tahun 2005, pasal 4).

Salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. (Nordiawan, dkk, 2007: 39)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemda. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Abdul Halim (2008 : 212) menyatakan

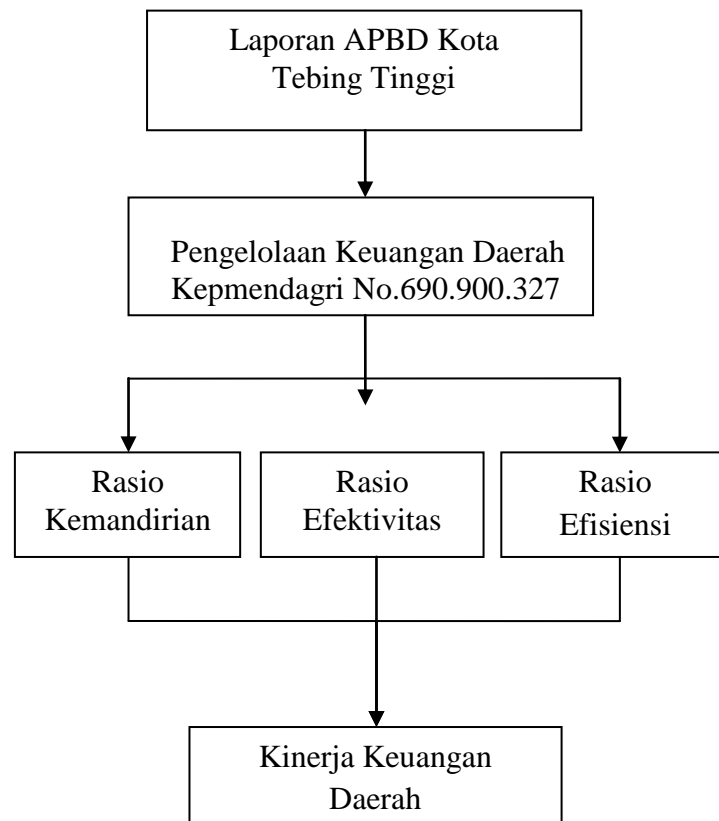
bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Penilaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan.

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Menurut Halim (2008: 230) menyatakan penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai keuangan, diantaranya Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensi, Keserasian, dan Pertumbuhan.

Senada dengan penelitian ini, peneliti Addina Marizka (2010) juga melakukan penelitian dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan dalam merealisasikan pendapatan pada tahun 2003-2007 dapat dikatakan efektif dan efisiensi, pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan positif.

Kerangka berpikir dari penelitian ini dapat dilihat dari gambar 2.1 sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi berupa data-data jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah Kota Tebing Tinggi sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Menurut Moh. Nazir (2009 hal. 54), Pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki.

B. Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksiaan sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi dari penelitian tersebut adalah :

1. Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

2. Rasio keuangan daerah merupakan indikator dalam mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan, dimana keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan :

- a. Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Yang dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

- b. Efektivitas merupakan pengukuran tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dan efektivitas ini dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target penerimaan atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

- c. Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) merupakan pengukuran tingkat pengefisienan atas belanja daerah, dengan menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Rumus efisiensi adalah sebagai berikut.

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang beralamat di jalan Gunung Lauser, Kota Tebing Tinggi.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2017 sampai dengan November 2017. Adapun rincian waktu dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Jun				Jul				Agust				Sept				Okt				Nov			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pra Riset			■	■																				
2.	Pengajuan Judul				■	■	■	■	■																
3.	Pengesahaan Judul								■																
4.	Bimbingan Proposal									■	■	■	■												
5.	Penyelesaian Proposal									■	■	■	■												
6.	Seminar Proposal													■											
7.	Analisa Pengolahan Data																	■	■	■	■	■	■	■	■
8.	Bimbingan & Peny. Hasil Penelitian																	■	■	■	■	■	■	■	■
9.	Sidang Skripsi																								■

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, di mana data ini berupa data yang dihitung berupa data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi.

Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara langsung di tempat penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi 2012 sampai tahun 2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen, dan laporan hasil dari realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tebing Tinggi selama Tahun 2012 sampai tahun 2016 yang diperlukan oleh peneliti.

2. Wawancara

Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada bagian yang terkait atau berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah,

dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif yaitu untuk menghitung tingkat kinerja keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang berasal dari pendapatan dan belanja daerah kota Tebing Tinggi berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

1. Mengumpulkan data penelitian yang dilakukan berupa Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kota Tebing Tinggi tahun 2012 sampai tahun 2016.
2. Menghitung pengukuran keuangan daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi
3. Menghitung kinerja keuangan Pemerintah dilakukan adalah dengan mengukur kemandirian keuangan daerah, efisien dan efektivitas yang sesuai dengan standar *Kepmendagri No. 690.900.327*
4. Menganalisis dan membahas kinerja keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan indikator yang sesuai dengan teori.
5. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kota Tebing Tinggi maka diharapkan Kota Tebing Tinggi mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Tebing Tinggi. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Tebing Tinggi, maka nantinya akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi sendiri menetapkan retribusi daerahnya berasal dari retribusi tempat wisata, maupun retribusi tempat parkir, Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah No.5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah..

2. Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2012-2016. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Data yang digunakan

dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah :

a. Kemandirian Keuangan Daerah

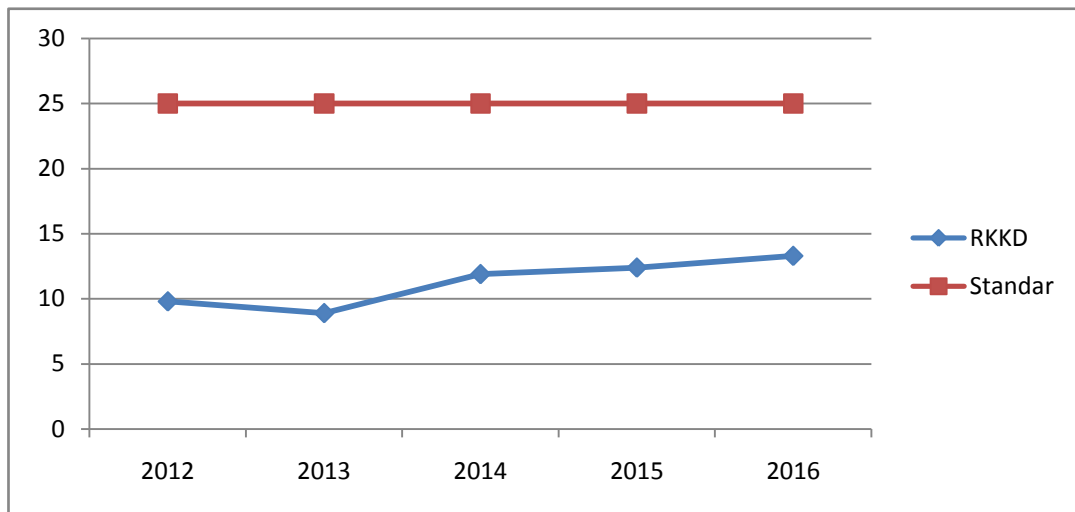
Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel IV.1
Kemandirian Pemerintah
Kota Tebing Tinggi

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	RKKD	Standar Kemandirian
2012	Rp. 47.330.983.758	Rp. 482.097.882.096	9,8%	0% - 25%
2013	Rp. 53.199.538.064	Rp. 596.249.862.831	8,9%	0% - 25%
2014	Rp. 74.515.273.851	Rp. 628.621.517.914	11,9%	0% - 25%
2015	Rp. 82.410.053.810	Rp. 667.061.086.952	12,4%	0% - 25%
2016	Rp. 94.058.491.717	Rp. 707.957.368.508	13,3%	0% - 25%

Sumber : Data diolah (2017)



Gambar IV.1 Kemandirian

Berdasarkan hasil perhitungan pada gambar IV.1. di atas kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi mengalami peningkatan. Untuk tahun 2012 kemandirian sebesar 9,8% yang termasuk dalam kategori rendah sekali karena berada diantara 0 sampai 25%. Untuk tahun 2013 kemandirian mengalami penurunan menjadi 8,9% yang termasuk dalam kategori rendah sekali karena berada diantara 0 sampai 25%.

Untuk tahun 2014 rasio kemandirian mengalami peningkatan menjadi 11,9% tetapi masih termasuk dalam kategori rendah sekali karena berada diantara 0 sampai 25%. Untuk tahun 2015 rasio kemandirian mengalami peningkatan 12,4% , tetapi juga masih termasuk dalam kategori rendah sekali karena berada diantara 0 sampai 25%. Untuk tahun 2016 kemandirian mengalami penurunan menjadi 13,3%, yang termasuk dalam kategori rendah sekali karena berada diantara 0 sampai 25%.

Walaupun kemandirian mengalami peningkatan dan penurunan, tetapi masih tergolong rendah sekali, karena masih berada diantara 0 sampai 25%, selain itu kemandirian pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi masih termasuk

pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang kurang mampu melaksanakan otonomi daerah).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan, tetapi peningkatan yang terjadi masih dikategorikan rendah sekali, dimana Pemerintah Kota Tebing Tinggi dianggap dalam mengelola pendapatan asli daerah kurang mampu berdiri sendiri dalam mengelola keuangan daerah, dan hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi.

b. Efektivitas

Efektivitas pendapatan menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio Efektivitas pendapatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

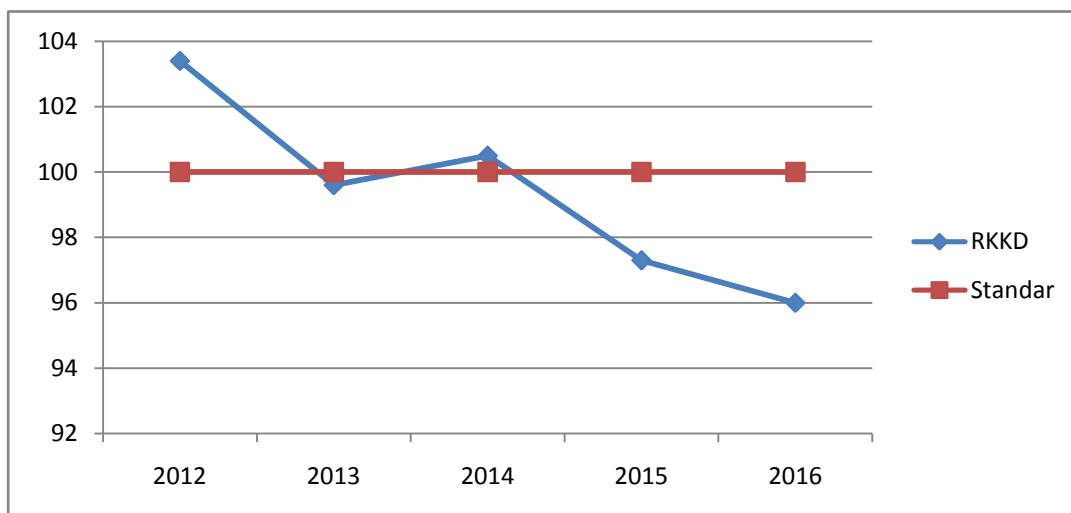
Dalam penelitian ini pengukuran efektivitas dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel IV.2
Efektivitas Pemerintah
Kota Tebing Tinggi

Tahun	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	Efektivitas	Standar Efektivitas
2012	Rp. 482.097.882.096	Rp. 467.794.127.694	103,4%	($x > 100\%$)
2013	Rp. 596.249.862.831	Rp. 598.722.930.567	99,6%	($x > 100\%$)
2014	Rp. 628.621.517.914	Rp. 625.779.796.283	100,5%	($x > 100\%$)
2015	Rp. 667.061.086.952	Rp. 685.603.027.096	97,3%	($x > 100\%$)
2016	Rp. 707.957.368.508	Rp. 736.984.324.320	96%	($x > 100\%$)

Sumber : Data diolah (2017)



Gambar IV.2 Efektivitas

Dapat dilihat dari tabel IV.2 untuk target penerimaan pendapatan daerah untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami penurunan, untuk tahun 2012 efektivitas sebesar 103,4% yang termasuk dalam kategori sangat efektif karena berada diatas 100%, untuk tahun 2013 efektivitas mengalami penurunan menjadi 99,6% yang termasuk dalam kategori efektif karena berada diantara 90% sampai 100%. Untuk tahun 2014 efektivitas mengalami peningkatan menjadi 100,5% yang termasuk dalam kategori sangat efektif karena berada diatas 100%.

Sedangkan untuk tahun 2015 efektivitas mengalami penurunan menjadi 97,3% yang termasuk dalam kategori efektif karena berada diantara

90% sampai 100%, dan ditahun 2016 efektivitas mengalami penurunan menjadi 96% yang termasuk dalam kategori efektif karena berada diantara 90% sampai 100%.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pajak daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami penurunan. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi dalam melakukan pengelolaan pendapatan daerah mengalami penurunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

c. Rasio Efisiensi

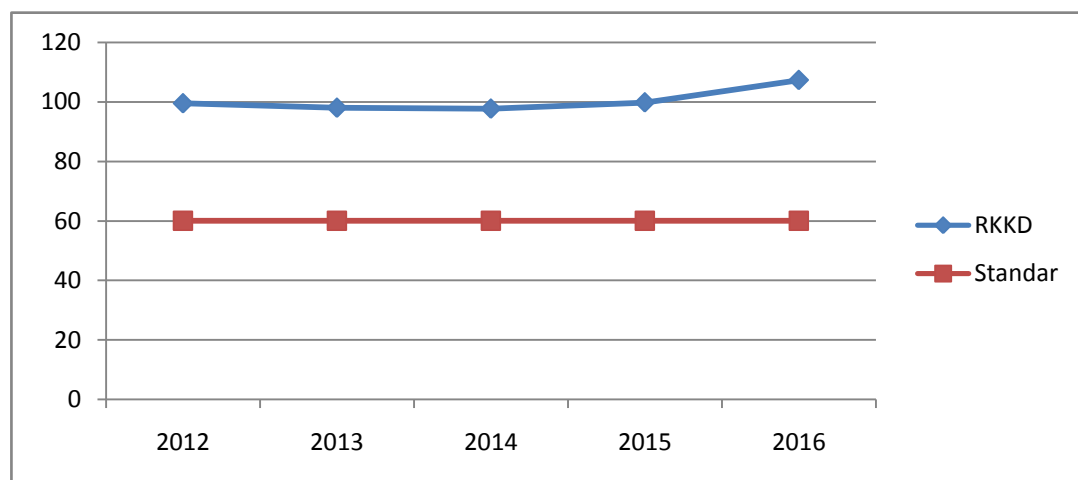
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel IV.3
Efisien Pemerintah
Kota Tebing Tinggi

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Efisien	Standar Efisien
2012	Rp. 479.585.196.047	Rp. 482.097.882.096	99,5%	< 60%
2013	Rp. 584.572.435.995	Rp. 596.249.862.831	98%	< 60%
2014	Rp. 614.015.440.542	Rp. 628.621.517.914	97,7%	< 60%
2015	Rp. 666.009.096.237	Rp. 667.061.086.952	99,8%	< 60%
2016	Rp. 759.862.992.873	Rp. 707.957.368.508	107,3%	< 60%

Sumber : Data diolah (2017)



Gambar IV.3 Efisiensi

Dapat dilihat dari tabel IV.3 untuk rasio efisiensi pada tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan termasuk dalam kategori kurang efisien. Untuk tahun 2012 rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 98% yang termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada diantara 90% sampai 100%, sedangkan untuk tahun 2014 rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 97,7% yang termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada diantara 90% sampai 100%, untuk tahun 2015 rasio efisiensi mengalami peningkatan menjadi 99,8% yang termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada diantara 90% sampai 100%. Dan untuk tahun 2016

rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 107,3% tetapi masih termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%.

Melalui analisis efisien dapat diketahui seberapa besar efisien dalam belanja daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Dengan perhitungan rasio efisiensi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tebing Tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan. Untuk belanja daerah dalam memperoleh pendapatan daerah untuk tahun 2012 sampai tahun 2015 dalam kategori kurang efisien, sedangkan ditahun 2016 efisiensi berada dalam kategori tidak efisien, hal ini tidak baik bagi Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah mengalami penurunan karena Pemerintah tidak mampu dalam meminimalkan belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

B. Pembahasan

Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai banyak tujuan. Tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik.

1. Penyebab kemandirian dan efektivitas mengalami penurunan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi :

Untuk tingkat kemandirian Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan, tetapi peningkatan yang terjadi masih dikategorikan rendah sekali, Dimana penyebab menurunnya rasio kemandirian ini terjadi dikarenakan rendahnya jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi, sehingga pemerintah daerah masih banyak bergantung dengan dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, guna untuk menjalankan kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi, dimana Pemerintah belum mampu dalam menjalankan kegiatannya yang berasal dari dana Pendapatan Asli Daerah, dimana pemerintah daerah masih sangat bergantung dengan dana yang berasal dari pusat untuk menjalankan pembangunan daerah Kota Tebing Tinggi, hal ini terjadi dikarenakan penghasilan yang diperoleh dari PAD Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi yang masih sangat rendah, dimana dana PAD tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dalam pembangunan daerah Kota Tebing Tinggi

Untuk tingkat efektivitas Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami penurunan. Hal ini terbukti dengan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang tidak mampu dalam mencapai target yang telah ditentukan. Penurunan yang terjadi untuk tingkat rasio efektivitas pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi, hal ini terjadi dikarenakan pendapatan yang diperoleh tidak mencapai anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan meningkatnya anggaran atas pendapatan

daerah, dimana menurunnya rasio efektivitas menunjukkan bahwa pemerintah belum optimal dalam meningkatkan pendapatan daerahnya.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi, dimana Pemerintah belum mampu dalam mencapai target atas pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah, hal ini terjadi dikarenakan kurang Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi kurang mampu dalam memprediksi atas potensi yang akan diperoleh dari pendapatan yang akan diperoleh Pemerintah Daerah untuk dimasa yang akan datang, dan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi melakukan prediksi atas perolehan pendapatan yang berasal dari tahun sebelumnya.

2. Penyebab efisiensi mengalami penurunan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi :

Untuk tingkat efisiensi Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami penurunan. Untuk belanja daerah dalam memperoleh pendapatan daerah untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 dalam kategori tidak efisien, hal ini terbukti dengan besarnya jumlah biaya operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi dibandingkan dengan Pendapatan yang diperoleh Kota Tebing Tinggi. Peningkatan yang terjadi untuk rasio efisiensi terjadi dikarenakan besarnya jumlah belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi dibandingkan dengan pendapatan daerah. Hal ini tidak baik bagi Pemerintah.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi, dimana Pemerintah belum mampu dalam mengefisienkan belanja daerah, hal ini terjadi dikarenakan banyaknya pembangunan sarana dan

prasarana yang belum terlaksana pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi, selain itu juga pendapatan daerah yang kurang maksimal, bahkan untuk tahun 2016 Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan pembangunan secara besar-besaran yang menyebabkan besarnya belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti halnya pembuatan jalan Tol yang digunakan menuju Bandara KualanNamu

Hal ini tidak baik bagi Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atau pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah mengalami penurunan karena Pemerintah tidak mampu dalam meminimalkan belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

3. Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi bila diukur dengan rasio keuangan daerah.

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami penurunan, hal ini dapat dijelaskan dari rasio keuangan yaitu:

- a. Pengukuran kemandirian yang terjadi pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi bila dilihat dari tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan, Walaupun rasio kemandirian mengalami peningkatan, tetapi masih tergolong sangat rendah, karena masih berada diantara 0 sampai 25%, selain itu rasio kemandirian pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi masih termasuk pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang kurang mampu melaksanakan otonomi daerah).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk pengukuran rasio kemandirian pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi masih dikategorikan rendah, dimana Pemerintah Kota Tebing Tinggi dianggap dalam mengelola pendapatan asli daerah kurang mampu berdiri sendiri dalam mengelola keuangan daerah, dan hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi.

- b. Pengukuran Efektivitas yang terjadi pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi bila dilihat untuk tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami penurunan, hal ini tidak baik bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan pemerintah daerah tidak mampu dalam mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami penurunan. Dengan menurunnya efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi dalam melakukan pengelolaan pendapatan daerah mengalami penurunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

- c. Rasio Efisiensi yang terjadi pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi bila dilihat dari tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan, hal

ini tidak baik bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atas Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan karena besarnya belanja yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi, untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan. Untuk belanja daerah dalam memperoleh pendapatan daerah untuk tahun 2016 dalam kategori tidak efisien, hal ini tidak baik bagi Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah mengalami penurunan karena Pemerintah tidak mampu dalam meminimalkan belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dimana Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang mengalami penurunan terjadi dikarenakan pendapatan daerah yang mengalami penurunan, selain itu belanja daerah yang digunakan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang melebihi dari pendapatan yang diperolehnya, hal ini tentu tidak baik bagi pemerintah, dimana pemerintah daerah tidak mampu mengelola pendapatan daerah guna menekan belanja daerah agar lebih efisien.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Joko Pramono (2014) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan PEMKO

Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian. Tingkat efisiensi dan efektivitas PEMKO Surakarta dalam mengelola dana sudah sangat efisien dan efektif, sedangkan untuk Pertumbuhan PAD cukup tinggi dan Pemerintah Daerah sudah mampu dalam melunasi pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak dari tempat dan waktu penelitian, dan pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dimana peneliti hanya mengukur pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan tiga rasio.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis kinerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi berdasarkan penelitian yang di ukur melalui rasio keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Kemandirian yang masih dibawah standar keuangan daerah terjadi dikarenakan kurang mampunya pemerintah daerah Tebing Tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi bergantung dengan pemerintah pusat. Sedangkan untuk efektivitas yang masih dibawah standar keuangan daerah terjadi dikarenakan pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi tidak mampu dalam mencapai target untuk pendapatan daerah tersebut.
2. Efisiensi yang berada diatas standar keuangan daerah terjadi dikarenakan besarnya belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi, bahkan realisasi belanja daerah melebihi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi.
3. Pengelolaan keuangan Daerah Kota Tebing Tinggi dengan menggunakan pengukuran keuangan daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi, dan meningkatnya belanja daerah Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi, selain itu juga pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi tidak mampu meningkatkan dan mengelola hasil pendapatan asli daerah,

sehingga Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi masih harus bergantung dengan dana pemerintah pusat .

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Tebing Tinggi harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Sebenarnya potensi yang dimiliki Pemerintah Kota Tebing Tinggi mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat sekitar. Selain itu Pemerintah Kota Tebing Tinggi selalu melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah.
2. Sebaiknya Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga seharusnya tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Agar kedepannya bisa tumbuh menjadi Kota yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- Addina Marizka. (2010). *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan*. FE USU: Medan.
- Anim Rahmayati. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*. Jurnal EKA CIDA Vol. 1 No. 1 Maret 2016.
- Dedi Nordiawan. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Fitri Umi Hanik. (2014). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang)*. JABPI ISSN Vol. 22, No 2, Juli 2014.
- George Kawung. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 14 no. 2 - Mei 2014
- Heri Triyono. (2013). *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo APBD 2009-2011*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Indra Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Listiyani Natalia. (2015). *Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman*. Jurnal Sosio-Humaniora Vol. 6 No. 1 Mei 2015.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. PT. Erlangga: Jakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi : Yogyakarta.
- Mohamad Mahsun. (2011). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPF: Yogyakarta.
- Moh. Nazir. (2009). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Mulyadi. (2007). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 *Tentang Dana Perimbangan*: Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015*: Jakarta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*: Jakarta.

Wakhyudi. (2013). *Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio Keuangan Daerah*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. Vol. 1 No. 2, 2013